

**PENGARUH TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DAN
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI NEGARA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode
Penelitian Administrasi Publik



Disusun Oleh :

Nama : Citra Khairunnisa

NPM : 2456041095

Kelas : Reg C

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN
2025/2026**

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah elemen fundamental yang memberikan arahan dan dasar bagi penelitian akademik. Dalam studi ini, kajian pustaka menyoroti tiga isu utama, yakni keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial oleh pemerintah, serta kepercayaan publik terhadap administratif negara. Ketiga isu ini bukanlah hal yang baru, tetapi telah banyak dibicarakan dalam berbagai sumber. Namun, evolusi dalam teknologi informasi, khususnya media sosial, serta tuntutan masyarakat untuk transparansi dalam birokrasi menjadikan isu-isu ini semakin diperlukan untuk diteliti.

Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu pilar esensial dalam pelaksanaan pemerintahan masa kini. Keterbukaan dihargai sebagai alat yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah praktik birokrasi yang tertutup. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2021 dalam Jurnal Kebijakan Publik mendapati bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh pemerintah, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hal ini disebabkan karena keterbukaan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang dapat diawasi.

Studi sejenis juga dilakukan oleh Salsabila pada tahun 2020 dalam skripsi di *Universitas Gadjah Mada* yang mengeksplorasi penerapan *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* di daerah. Ia menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar menyediakan data, tetapi juga memperhatikan cara penyajian data tersebut agar mudah dipahami. Masyarakat cenderung memiliki rasa percaya yang lebih tinggi ketika informasi yang diberikan disajikan dengan cara yang sederhana, jelas, dan dapat diakses tanpa adanya birokrasi yang rumit.

Selain keterbukaan, pemanfaatan media sosial pemerintah kini menjadi elemen kunci dalam komunikasi publik. Media sosial telah merubah cara interaksi antara pemerintah dan masyarakat dari yang sebelumnya satu arah menjadi interaktif. Kini pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan

masukan, kritik, bahkan keluhan dari masyarakat. Dalam penelitian oleh Sari dan Putra pada tahun 2022 dalam *Jurnal Administrasi Publik (Sinta 2)*, ditemukan bahwa pemerintah daerah yang aktif di media sosial cenderung memperoleh tingkat interaksi publik yang lebih tinggi serta mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

Dalam tesis Ramadhan yang ditulis pada 2021 di *Universitas Indonesia*, dijelaskan bahwa media sosial pemerintah dapat berperan sebagai alat legitimasi birokrasi. Ia menemukan bahwa saat pemerintah cepat menanggapi kritik publik melalui media sosial, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara meningkat. Sebaliknya, apabila media sosial hanya digunakan untuk menyebarluaskan informasi resmi tanpa adanya interaksi nyata, masyarakat menganggap pemerintah kurang terbuka.

Secara global, Mergel pada tahun 2021 dalam jurnal *Government Information Quarterly* menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan partisipasi publik. Ia berpendapat bahwa media sosial mampu memperluas jangkauan komunikasi pemerintah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasa terlibat dalam proses administrasi. Ini memberikan dampak positif terhadap legitimasi politik dan kepercayaan warga negara.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan administrasi negara. Kepercayaan publik mencerminkan legitimasi dan kredibilitas birokrasi. Menurut Dwiyanto pada tahun 2020, jika masyarakat percaya, maka mereka lebih mudah menerima kebijakan, lebih patuh terhadap peraturan, dan lebih aktif berpartisipasi. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan sikap apatis atau bahkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam studi yang dilakukan oleh Lestari (2022) yang dipublikasikan di *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (Sinta 2)*, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah dapat mempertahankan transparansi dan akuntabilitas. Apabila pemerintah hanya menunjukkan keterbukaan secara superficial, sementara praktik di lapangan tetap tertutup, maka masyarakat akan mengalami kekecewaan. Kepercayaan publik sangat rentan pudar jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelayanan.

Walaupun banyak penelitian telah meneliti hubungan antara transparansi, media sosial, dan kepercayaan publik, sebagian besar masih menggunakan pendekatan kuantitatif. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) yang mengevaluasi dampak keterbukaan informasi terhadap kepuasan publik menggunakan indeks numerik. Penelitian ini memang memberikan gambaran umum, tetapi tidak mendalami makna subjektif dari pengalaman masyarakat.

Studi kualitatif sangat penting karena mampu menyelami pengalaman, persepsi, dan evaluasi masyarakat dengan lebih mendalam. Salah satu contohnya adalah skripsi Wulandari (2021) di *Universitas Airlangga* yang memanfaatkan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana masyarakat melihat transparansi pemerintah daerah. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai transparansi tidak hanya berdasarkan kuantitas informasi yang diberikan, tetapi juga berdasarkan cara pemerintah mengkomunikasikan dan merespons masukan publik.

Hal yang serupa juga ditemukan dalam tesis Hakim (2022) di *Universitas Diponegoro*, yang mengungkapkan bahwa interaksi masyarakat dengan akun media sosial resmi pemerintah menghasilkan persepsi kepercayaan yang bervariasi. Bagi sebagian orang, keberadaan media sosial yang responsif menjadi tanda keterbukaan, sementara bagi yang lain, kurangnya respons justru menciptakan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan.

Dari berbagai penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa transparansi informasi publik dan penggunaan media sosial oleh pemerintah berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Namun, masih ada aspek yang belum banyak diteliti, yaitu bagaimana pengalaman masyarakat secara langsung saat berinteraksi dengan birokrasi melalui saluran digital tersebut. Sebagian besar studi masih fokus pada angka-angka kuantitatif, sehingga kurang memberikan ruang bagi dimensi naratif dan pengalaman individu.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian berusaha menggali pengalaman masyarakat secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana masyarakat mempersepsikan keterbukaan informasi dan interaksi melalui media sosial

pemerintah, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada tingkat kepercayaan mereka terhadap birokrasi.

2.2 Teori dan Konsep

Teori dan konsep berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga tingkatan teori yang digunakan, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Ketiganya saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana transparansi informasi publik dan pemanfaatan media sosial pemerintah dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi negara.

2.2.1 Grand Theory: Good Governance

Teori utama yang mendasari studi ini adalah konsep *good governance*. Ide ini muncul seiring dengan dorongan global untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip sentral dalam *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Dwiyanto (2020) menyatakan bahwa keberhasilan birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam layanan publik.

Informasi publik yang transparan adalah salah satu bentuk nyata dari prinsip *good governance*. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk memahami proses pengambilan keputusan, tata cara administrasi, beserta dasar hukum yang dipakai pemerintah dalam memberikan layanan. Hal ini menimbulkan rasa aman dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik karena mereka merasa terlibat dalam administrasi negara.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan prinsip kunci. Platform media sosial pemerintah yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat pertanggungjawaban publik. Ketika masyarakat mengeluarkan kritik atau pengaduan melalui media sosial, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memberikan respons yang cepat dan tepat. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, legitimasi pemerintah akan semakin diperkuat.

Secara konseptual, teori *good governance* membantu menjelaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya terbangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui praktik transparansi dan komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

2.2.2 Middle Theory: Open Government dan Literasi Digital

Sebagai penghubung antara konsep besar dan praktik, studi ini menerapkan gagasan *open government* serta *e-government* sebagai teori tengah. *Open government* menekankan pentingnya keterbukaan data, partisipasi masyarakat, dan kerja sama antara pemerintah dengan warganya. Wirtz dan Müller (2019) berpendapat bahwa keterbukaan data publik adalah manifestasi nyata dari niat pemerintah untuk menyediakan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Dalam kajian ini, transparansi informasi publik bisa dilihat sebagai salah satu penerapan prinsip *open government*.

Di sisi lain, *e-government* berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat pemerintahan lebih efisien, transparan, dan responsif. Penggunaan media sosial oleh pemerintah merupakan elemen dari praktik *e-government* yang menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai saluran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi negara.

Skripsi yang disusun oleh Ramadhani (2020) di *Universitas Airlangga* menegaskan bahwa *open government* tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya saluran komunikasi yang dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah melalui media sosial. Ketika pemerintah mampu mengintegrasikan media sosial dalam administrasi, hal ini membuat mereka lebih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap sebagai entitas yang transparan, responsif, dan melibatkan partisipasi.

Dalam hal ini, hubungan antara transparansi dan media sosial pemerintah dapat dijelaskan melalui teori *open government*. Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan, sedangkan media sosial menjadi saluran untuk menyebarkan dan memastikan data tersebut sampai kepada masyarakat. Jika kedua elemen ini berjalan selaras, maka kemungkinan untuk membangun kepercayaan publik semakin tinggi.

2.2.3 Applied Theory: Kepuasan Masyarakat

Pada tingkat praktis, penelitian ini memanfaatkan teori kepercayaan publik. Kepercayaan publik dapat dipahami sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan mereka, sesuai dengan norma hukum, serta mampu memberikan layanan yang adil dan berkualitas.

Bouckaert dan Van de Walle (2021) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada birokrasi terbentuk berdasarkan pengalaman langsung maupun tidak langsung saat berinteraksi dengan pemerintah. Keterbukaan informasi publik dan penggunaan media sosial oleh pemerintah merupakan faktor penting yang memengaruhi bagaimana kepercayaan ini dipersepsikan. Apabila masyarakat melihat pemerintah bersikap terbuka dan responsif, maka tingkat kepercayaan mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap menyembunyikan informasi atau tidak menanggapi kritik di media sosial, kepercayaan publik akan berkurang.

Dalam tesis yang disusun oleh Pratiwi (2022) di *Universitas Diponegoro*, diungkapkan bahwa interaksi masyarakat dengan akun media sosial resmi pemerintah menjadi salah satu elemen penting pembentukan kepercayaan masyarakat. Tanggapan yang cepat dan penggunaan bahasa yang sederhana dalam menjawab pertanyaan publik di media sosial terbukti meningkatkan persepsi positif terhadap birokrasi.

Teori kepercayaan publik ini menekankan bahwa transparansi dan komunikasi digital bukan sekadar metode teknis, melainkan juga elemen krusial dalam membangun legitimasi pemerintah. Kepercayaan masyarakat merupakan hasil yang dipengaruhi oleh interaksi berulang antara pemerintah dan warga negara, baik melalui keterbukaan informasi maupun melalui media komunikasi yang interaktif.

2.2.4 Sintesis Teori dan Konsep

Berdasarkan uraiannya, hubungan antar tingkatan teori dapat disusun sebagai berikut:

1. Di tingkat *grand theory*, *good governance* menyediakan kerangka luas yang menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga.

2. Pada tingkat *middle theory*, konsep *open government* dan *e-government* menerangkan cara-cara prinsip transparansi diterapkan dalam praktik, termasuk pemanfaatan media sosial oleh pemerintah.
3. Di level *applied theory*, gagasan kepercayaan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana transparansi dan penggunaan media sosial oleh pemerintah mempengaruhi legitimasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat.

Dengan dasar teori yang berlapis ini, harapannya penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana transparansi informasi publik dan penggunaan media sosial pemerintah berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi negara. dari interaksi antara kedua variabel itu terhadap pengalaman pengguna layanan publik.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam studi ini disusun untuk menjelaskan bagaimana keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi negara. Kerangka ini merupakan gabungan antara berbagai teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian yang ada, sekaligus memberikan rujukan logis bagi penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu landasan fundamental dalam pengelolaan pemerintahan yang modern. Transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban normatif yang termaktub dalam regulasi, seperti *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah yang memberikan informasi dengan terbuka mengenai kebijakan, prosedur, biaya, dan hasil kerja cenderung lebih dianggap kredibel oleh masyarakat, karena masyarakat dapat mengevaluasi dan mengawasi kinerja birokrasi secara langsung.

Penggunaan media sosial oleh pemerintah muncul sebagai terobosan dalam komunikasi publik. Media sosial memberi pemerintah kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara cepat, dinamis, dan efektif. Berbeda dengan media komunikasi konvensional yang umumnya bersifat satu arah, media sosial menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ini

memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, namun juga berperan sebagai partisipan aktif yang dapat mengungkapkan harapan, memberikan masukan, dan meminta pertanggungjawaban kepada birokrasi.

Hubungan antara transparansi informasi publik dan pemanfaatan media sosial memiliki sifat yang saling melengkapi. Keterbukaan menghadirkan informasi yang tepat dan relevan, sedangkan media sosial bertindak sebagai sarana distribusi yang efisien untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Apabila salah satu elemen ini kurang optimal, efek pada tingkat kepercayaan masyarakat juga akan terpengaruh. Contohnya, transparansi yang tinggi tetapi tanpa dukungan media sosial akan membuat informasi hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Di sisi lain, aktifnya media sosial tanpa adanya transparansi yang berarti hanya akan menjadi alat untuk propaganda pemerintah.

Tingkat kepercayaan masyarakat merupakan hasil yang dipengaruhi oleh sinergi kedua aspek ini. Kepercayaan bukan sekadar emosi positif, tetapi juga merupakan legitimasi yang menentukan stabilitas serta efektivitas pemerintahan. Menurut Bouckaert dan Van de Walle (2021), kepercayaan publik terbentuk melalui pengalaman langsung dan tidak langsung masyarakat saat berinteraksi dengan birokrasi. Dalam hal ini, pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi publik dan berkomunikasi dengan akun resmi pemerintah di media sosial menjadi elemen penting.

Berbagai studi sebelumnya mendukung asumsi ini. Lestari (2022) menemukan bahwa keterbukaan informasi publik disertai tanggapan cepat di media sosial dapat meningkatkan persepsi masyarakat mengenai kejujuran dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tesis Ramadhan (2021) juga menunjukkan bahwa media sosial pemerintah yang bersifat interaktif dapat memperkuat rasa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga kepercayaan publik meningkat. Namun, banyak penelitian tersebut yang masih menerapkan pendekatan kuantitatif, sehingga kurang mendalami pengalaman subjektif masyarakat.

Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam cara masyarakat memaknai transparansi dan pemanfaatan media sosial pemerintah. Melalui wawancara mendalam, peneliti mampu mengungkap

pengalaman nyata masyarakat saat berinteraksi dengan birokrasi melalui platform digital. Observasi juga dapat dipakai untuk menilai bagaimana akun resmi pemerintah menyajikan informasi, merespon pertanyaan, atau menanggapi kritik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada angka atau indeks, tetapi juga narasi serta pengalaman masyarakat.

Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat bersifat dinamis dan tergantung konteks, bukanlah sesuatu yang permanen. Kepercayaan dapat meningkat saat masyarakat melihat adanya keterbukaan dan responsifitas dari pemerintah, tetapi bisa juga berkurang jika mereka merasa diabaikan. Oleh karena itu, transparansi dan penggunaan media sosial oleh pemerintah dianggap sebagai elemen krusial yang harus dikelola dengan baik dan berkala.

Dalam konteks ini, literatur tentang administrasi negara mendapatkan tambahan wawasan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan informasi publik melalui saluran formal tidak lagi cukup. Dengan kehadiran media sosial, pemerintah dituntut untuk berperilaku lebih cepat, interaktif, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat sebagai hasil tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh cara penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut. Ketiga, pendekatan kualitatif membawa perspektif baru tentang pandangan masyarakat terhadap birokrasi di zaman digital.

Secara sistematis, kerangka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: transparansi informasi publik serta pemanfaatan media sosial oleh pemerintah adalah dua variabel utama yang saling berkaitan. Keduanya memiliki dampak langsung bagi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, interaksi yang terjadi di antara kedua variabel tersebut memperkuat pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi dan berinteraksi melalui media sosial membentuk derajat kepercayaan mereka terhadap penyelenggaraan administrasi negara.

Kerangka pemikiran ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga memiliki manfaat praktis. Bagi pemerintah, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi

tambahan terhadap literatur administrasi negara dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Bagi masyarakat, penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja birokrasi.

Dengan demikian, kerangka ini menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan penelitian kualitatif dalam mengeksplorasi dampak transparansi informasi publik serta penggunaan media sosial pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana birokrasi modern membangun legitimasi melalui keterbukaan dan komunikasi digital, sekaligus mengungkapkan pandangan masyarakat yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam studi kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2021). *Public Sector Reform and Trust in Government*. London: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2020). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, R. (2022). Analisis Interaksi Media Sosial Pemerintah terhadap Persepsi Kepercayaan Publik (Tesis, Universitas Diponegoro). Semarang.
- Hidayat, M. (2021). Transparansi Informasi Publik sebagai Instrumen Peningkatan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 115–132.
- Lestari, D. (2022). Transparansi dan Responsivitas Birokrasi dalam Perspektif Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(1), 45–60.
- Mergel, I. (2021). Social media in the public sector: Participation, transparency, and collaboration. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101112>
- Pratiwi, S. (2022). Media Sosial Pemerintah dan Pembentukan Kepercayaan Publik (Tesis, Universitas Diponegoro). Semarang.
- Ramadhan, A. (2021). Peran Media Sosial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik (Tesis, Universitas Indonesia). Depok.
- Rachmawati, D., & Nugraha, H. (2020). Literasi Digital dan Kepercayaan Publik dalam E-Government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(2), 155–172.
- Salsabila, N. (2020). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah (Skripsi, Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta.
- Sari, I., & Putra, R. (2022). Media Sosial Pemerintah dan Partisipasi Publik: Studi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 221–239.
- Wirtz, B. W., & Müller, W. M. (2019). An integrated model of open government: Transparency, participation, and trust. *Government Information Quarterly*, 36(2), 333–346. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.005>
- Wulandari, E. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Informasi Pemerintah Daerah (Skripsi, Universitas Airlangga). Surabaya.